



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 13(1), 153-164



RESEARCH ARTICLE

PEMIKIRAN FUAD HASSAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA (1985-1993)

Ade Napsiyah, Erlina Wiyanarti

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
ddeee882@gmail.com

To cite this article: Napsiyah, A., & Wiyanarti, E. (2024). Pemikiran fuad hassan dalam kebijakan pendidikan indonesia (1985-1993). *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 13(1), 153-164. <https://doi.org/10.17509/factum.v13i1.28850>.

Abstract

This study is back grounded by Fuad Hasan's ideas that are still relevant despite the emergence of technology and knowledge advances today. The primary issue being addressed in this study is "How are Fuad Hassan ideas on Indonesia's Education Policies (1985-1993). The method used in this study is historical study by conducting these four steps; heuristics, critics, interpretation, and historiography. The background of his career journey and his ideas were highly influential to the policies he took when he was appointed to be the Minister of Education and Culture of Indonesia in 1985-1993. In the beginning of his tenure, his focus was in the completion of the Law on The National Education System instead of making vast changes. Third, the policies issued by him was publishing law No. 2 year 1984 about National Education System, revising 1984 curriculum and developing 1994 curriculum, decentralizing EBTANAS, decentralizing college entrance examination, issuing regulations on college senate presence, as well as changing the naming of degrees. His policies brought positive impacts as the stability in education was being cared for. Nevertheless the policies issued was also in attention from education experts as continuing to implement the 1984 curriculum was full by authorities' interests.

Abstrak

Latar belakang peneliti mengambil permasalahan ini disebabkan karena mengingat di era sekarang di mana berkembang pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan Fuad Hassan masih sangat relevan. Masalah utama yang diangkat dari skripsi ini adalah "Bagaimana Pemikiran Fuad Hassan dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia (1985-1993)". Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis dengan melakukan empat langkah penelitian yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Latar belakang perjalanan karir dan pemikiran Fuad Hassan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 1985-1993. Fuad Hassan pada awal menjabat sebagai menteri tidak membuat perubahan-perubahan besar sebagai gantinya lebih fokus pada penuntasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Fuad Hassan di antaranya diterbitkannya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perbaikan kurikulum 1984 sampai dengan dikembangkannya kurikulum 1994, desentralisasi pelaksanaan EBTANAS, desentralisasi pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi, peraturan mengenai kehadiran senat mahasiswa perguruan tinggi, serta perubahan penamaan gelar kesarjana. Kebijakan yang dikeluarkan Fuad Hassan mendapat perhatian dari pakar pendidikan mengenai konsekuensi diteruskannya kurikulum 1984 yang dianggap sarat kepentingan penguasa.

Article Info

Article History:

Submitted/Received 10 Oct. 2020
First Revised 30 January 2024
Accepted 01 April 2024
First Available online 30 April 2024
Publication 30 April 2024

Keyword:

Fuad Hassan
Indonesia's Education
Education Minister

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sumber bagi ilmu dan pengetahuan. Bila sebuah bangsa melalaikan pendidikan, berarti ia juga menelantarkan masa depannya sendiri (Buchori, 2001, hlm. 7). Mengingat ilmu pengetahuan serta teknologi adalah energi utama yang menjadi penggerak dalam dunia modern, maka ilmu pengetahuan dan teknologi dapat disebut sebagai salah satu tolak ukur dari sebuah peradaban. Dengan kata lain, dapat dianalogikan jika ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mesin untuk membangun sebuah peradaban, dan ia menjadi parameter bagi kemajuan sebuah bangsa. Sementara itu, melalui pendidikanlah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diproduksi, dikembangkan, serta didistribusikan.

Pendidikan merupakan instrumen untuk merealisasikan salah satu amanat dalam UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam tata pemerintahan Indonesia sendiri, kebijakan terkait pendidikan dibawah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kementerian ini dinamakan Kementerian Pengajaran, dengan Ki Hajar Dewantara sebagai menteri perngajaran pertama. Pada masa Soeharto, kemudian dinamakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud, 2015). Dalam sejarahnya, kursi menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia, pernah diduduki oleh seorang pemikir, akademisi yang mempunyai rekam jejak akademik yang cemerlang yakni Fuad Hassan.

Fuad Hassan adalah seorang ilmuwan bidang psikologi, yang dikenal sebagai seorang humanis dan mencintai seni. Sebagai Psikolog, Fuad Hassan dikenal pula mempunyai kejelian dalam melihat fenomena sosial (Kompas, 2007, hlm. 1). Hal itu bisa terlihat dari bagaimana Fuad Hassan sudah mempunyai pandangan bahwa tidak begitu saja segala sesuatu dari negara yang sudah maju bisa dialihkan ke dalam masyarakat kita yang berbeda latar belakang kebudayaan. Diversitas sosial, kebudayaan, dan kesejarahan masyarakat-masyarakat manusia

mendesakkan keharusan-keharusan masing-masing. Fuad Hassan menyatakan bahwa kita bisa membutuhkan diri terhadap kenyataan jika dunia maju (berikut segala penemuan-penemuannya serta metode-metode penguasaannya terhadap kemajuan) pun tidak luput dari kegagalan-kegagalan serta frustrasi-frustasi. Ribuan buku yang ditulis tentang modern management masih belum sampai pada suatu kepastian tentang cara/model mana yang terbaik. Bagi Fuad Hassan, merupakan sebuah kekeliruan bila yang diinginkan adalah suatu cara atau model tertentu yang dijadikan pedoman dalam pembaruan metode manajemen dalam budaya kita. Majunya masyarakat-masyarakat seperti di Amerika dan Jepang, cukup memberikan bukti betapa eratnya hubungan antara metode-metode manajemen dan perkembangan historis-kultural, sedangkan mentalitas kedua bangsa itu masing-masing juga berhubungan dengan watak dan perangai kedua masyarakatnya yang menjelma sebagai hubungan timbal balik antara manusia dan karakteristik geografis dan alamiahnya (Hassan, 1977, hlm. 8-9).

Fuad Hassan tercatat sebagai salah satu dari tujuh menteri pendidikan dan kebudayaan sepanjang sejarah pemerintahan Soeharto. Sebelum Fuad Hassan, orang yang terlebih dahulu menduduki kursi menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Nugroho Notosusanto. Dengan kata lain, kursi menteri pendidikan dan kebudayaan yang diduduki oleh Fuad Hassan saat itu menggantikan Nugroho Notosusanto (Kemdikbud.go.id).

Penting untuk dicermati, “naik di tengah jalan” menyebabkan Fuad Hassan tidak membuat perubahan-perubahan besar pada tahun-tahun pertama kepemimpinannya. Bahkan, saat itu Fuad Hassan berjanji tidak akan menjadikan anak didik sebagai kelinci percobaan, seperti pameo yang berkembang dalam masyarakat “ganti pejabat, ganti kebijakan”. Menyikapi kehebohan mengenai PSPB yang dicanangkan oleh Nugroho Notosusanto, Fuad Hassan lebih memilih

meredam kehebohan itu. Tidak banyak kalimat yang dikeluarkan untuk merespon akibat kehebohan sehubungan dengan keluarnya kebijakan tersebut. Sebagai gantinya, Fuad Hassan lebih memilih berkonsentrasi bagi penuntasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan menjadi dasar Sistem Pendidikan Nasional (Darmaningtyas, 2004, hlm. 76).

Secara umum, permasalahan fundamental dalam dunia pendidikan Indonesia selama 32 tahun pemerintahan Soeharto (termasuk periode Fuad Hassan sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan) pendidikan Indonesia dianggap sangat militeristik, yang semestinya secara filosofis dan teknis operasionalnya pendidikan militer berbeda dengan pendidikan umum (Darmaningtyas, 1999, hlm. 4). Oleh sebab itu, hal menarik dalam penelitian topik ini, yakni bagaimana Fuad Hassan yang sebelumnya dikenal menjadi seorang akademisi yang humanis memposisikan diri di tengah ideologi militeristik yang ditanamkan oleh pemerintahan Soeharto.

Berdasarkan pemaparan di atas, kajian penelitian ini akan membahas tentang kebijakan pendidikan di Indonesia pada periode Fuad Hassan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di samping tentunya turut membahas pula latar belakang keilmuan atau pemikiran Fuad Hassan, yang sudah barang tentu gagasan-gagasannya bukan hanya memperkaya diskursus akademik, seperti pandangan-pandangannya terkait dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi ataupun pandangannya terkait dengan studi humaniora secara umumnya yang turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ia rumuskan selama menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kajian temporal dalam penelitian ini sendiri yakni tahun 1985-1993. Tahun 1985 dipilih sebagai titik awal kajian, karena dalam tahun tersebut menjadi tahun awal Fuad Hassan diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara tahun 1993 dipilih sebagai batas temporal, karena pada tahun

tersebut adalah tahun terakhir Fuad Hassan selesai menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, penulis juga menganggap topik ini penting untuk diteliti mengingat di era sekarang di mana berkembang pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, gagasan-gagasan Fuad Hassan masih sangat relevan. Salah satu relevansinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Hassan (dalam Sartre, 2002, hlm. 41) Fuad Hassan yang terpengaruh oleh pemikiran eksistensialisme sudah mempunyai pikiran jika teknologi bisa mengakibatkan dehumanisasi. Tentu pemikiran Fuad Hassan sebagai sosok yang humanis tersebut dapat dijadikan bahan refleksi. Tidak hanya itu, topik ini pun penting karena menyangkut soal pendidikan, di mana melalui topik ini kita bisa belajar mengenai sejarah pendidikan di Indonesia, agar kekeliruan-kekeliruan kebijakan pendidikan di masa lalu tidak diulangi dan menjadi bahan pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemikiran Fuad Hassan dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia (1985-1993)?”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang kehidupan Fuad Hassan, Kebijakan Fuad Hassan selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta dampak dari kebijakan Fuad Hassan terhadap pendidikan Indonesia. Selain itu penelitian ini juga memiliki manfaat secara teoretis yakni memperkaya diskursus ilmiah mengenai masalah dan kebijakan pendidikan di Indonesia, serta manfaat praktis yakni dapat menunjang materi tentang tokoh nasional dan materi sejarah kelas XII tentang Orde Baru.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. Louis Gottschalk dalam bukunya yang berjudul “Mengerti Sejarah” menyatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji

dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau serta rekonstruksi imajinatif masa lampau yang diperoleh dengan menggunakan metode sejarah (Gottschalk, 2008, hlm. 39). Sementara itu (Sjamsuddin, 2007, hlm. 17-19) memaparkan bahwa metode historis adalah suatu proses pengujian serta analisa secara kritis dan sistematis terhadap rekaman ataupun peninggalan masa lalu.

Jika mengacu pada pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode sejarah adalah sebuah metode yang digunakan dalam proses penelitian sejarah, di mana data ataupun faktanya didapatkan berdasarkan kejadian-kejadian di masa lampau yang diuji secara kritis dan analitis serta disajikan secara sistematis dalam bentuk tertulis. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh penulis dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan metode sejarah. Begitu pula dalam penelitian ini, penulis memilih metode sejarah yang umum digunakan dalam penelitian sejarah. Adapun menurut Ismaun (2005, hlm. 125-131) metode sejarah memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Heuristik (pengumpulan sumber-sumber).
2. Kritik atau analisis sumber (eksternal dan internal).
3. Interpretasi (penafsiran).
4. Historiografi (penulisan sejarah).

Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur atau studi kepustakaan teknik studi literatur ini adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoretis, sehingga diperoleh fakta yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini. pengkajian dengan studi literatur ini akan membuat proses penelitian berlangsung lebih kritis dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Fuad Hasan

Fuad Hassan lahir dari pasangan Ahmad Hassan dan Tjiptaningroem di Semarang, Jawa

Tengah, pada tanggal 26 Juni 1929. Fuad Hassan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Fuad Hassan menempuh pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan di Solo. Ayah Fuad Hassan adalah seorang pemain mandolin yang piawai, ternyata kegemaran ayahnya pada seni diikuti pula oleh Fuad Hassan, sehingga masa kecil Fuad Hassan sempat mencita-citakan menjadi seorang konduktor. Sejak sekolah dasar, Fuad Hassan pun sudah aktif di dunia musik, bahkan Fuad Hassan sering bolos belajar di sekolah karena ingin belajar atau bermain musik. Biola adalah alat musik yang paling disukai oleh Fuad Hassan. Pada akhirnya, kebiasaan bolos sekolah yang sering dilakukan oleh Fuad Hassan diketahui oleh ayahnya, akan tetapi karena ayah Fuad Hassan lebih bersikap moderat, ia tidak serta merta bersikap keras kepada Fuad Hassan. Ayah Fuad Hassan hanya menasehati Fuad Hassan bahwa sekolah formal juga penting, malah ayah Fuad Hassan mengatakan kalau Fuad Hassan ingin terjun ke dunia musik harus secara total (Asnan, 2018, hlm. 50). Dengan kata lain, ayah Fuad Hassan merestui minat dan bakat seni yang dimiliki Fuad Hassan.

Pada tahun 1950 Fuad Hassan pergi ke Jakarta. Di Jakarta Fuad Hassan mendaftarkan diri untuk mengikuti tes sekolah musik di Roma. Akan tetapi, niat untuk menjadi musikus profesional yang sebelumnya kuat itu pada akhirnya diurungkan oleh Fuad Hassan. Fuad Hassan mengurungkan niatnya tersebut karena terpengaruh teman serta kesadarannya sendiri dengan melihat realita bahwa banyak orang yang selama puluhan tahun bermain musik, tetapi nyaris tidak mendapat apresiasi yang wajar dari khalayak ramai. Selanjutnya, Fuad Hassan menjatuhkan pilihan pendidikannya pada Fakultas Psikologi UI dan menyelesaikan S1 pada tahun 1958. Setelah itu, Fuad Hassan melanjutkan studinya di fakultas Psikologi dan Filsafat University of Toronto Canada pada tahun 1962, sementara S3 diselesaikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Adapun beberapa karya keilmuan Fuad Hassan yang telah dibukukan, antara lain:

Pengantar Filsafat Barat, Berkenalan dengan Eksistensialisme, Renungan Budaya, dan sebagainya.

Jejak pemikiran Fuad Hassan terdapat dalam bidang Filsafat, Psikologi, Pendidikan, Politik, Hubungan Internasional dan Seni Budaya. Keragaman minat dan penguasaan di berbagai ranah pemikiran, pengalaman akademiknya yang kaya juga kiprahnya sebagai teknokrat yang terlibat dalam birokrasi negara memberi kekuatan pada pemikirannya.

Dengan kata lain, pemikiran ataupun latar belakang pemikiran keilmuan Fuad Hassan tentu turut mempengaruhi Fuad Hassan dalam merumuskan kebijakan selama ia terlibat dalam birokrasi pemerintahan, lebih rincinya selama ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, begitupun sebaliknya, pengalamannya sebagai menteri atau teknokrat turut andil dalam membentuk pola pandangannya di masa-masa sesudahnya.

Menurut Wardiman Djojonegoro, seorang yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993-1998, ia berpendapat bahwa Fuad Hassan adalah seorang ilmuwan yang mumpuni dalam bidang Psikologi dan Filsafat. Wardiman pun mengapresiasi peran Fuad Hassan dalam pendidikan nasional, terutama perannya dalam memperjuangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perjalanan Karir Fuad Hassan

Adapun perjalanan karir Fuad Hassan sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan terlebih dulu mengawali karirnya sebagai Asisten pada Balai Psikoteknik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1952-1956, lalu menjadi asisten pada Jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1956-1958. Saat menjadi pengajar di Psikologi Universitas Indonesia, Fuad Hassan dikenal sebagai pengajar yang mempunyai kedekatan dengan mahasiswanya. Begitu pula saat Fuad Hassan menjadi pengajar di Sekolah

Staf Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Seskoal), TNI Angkatan Laut (Seskoal) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) periode 1966-1976. Tahun 1968-1970, Fuad Hassan terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPR/MPR RI, kemudian diangkat menjadi Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia serta Direktur Lembaga Studi Strategis Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1972-1976). Selain itu, Fuad Hassan juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Mesir, merangkap Sudan, Somalia, dan Jibouti pada 1976-1980 serta menjadi kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri (1980-1985) merangkap sebagai anggota MPR RI pada tahun 1982-1987. Barulah pada tahun 1985, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI meminta Fuad Hassan untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Nugroho Notosusanto yang meninggal dunia.

Ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, fenomena bagaimana peserta didik lebih meminati melanjutkan ke sekolah kejuruan dibanding melanjutkan pendidikan ke SMA, menjadi perhatian Fuad Hassan. Bagi Fuad Hassan, fenomena tersebut adalah gejala baik, itu artinya orang-orang yang masuk ke perguruan tinggi akan lebih terseleksi, sementara peserta didik yang memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah kejuruan atau disebut oleh Fuad Hassan dengan istilah “studi praktis”, adalah mereka yang difokuskan untuk mencari pekerjaan (Asnan, 2018, hlm. 57).

Kebijakan pendidikan sendiri dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan bangsa secara keseluruhan (Tilaar & Nugroho, 2008, hlm. 268). Dengan kata

lain, kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik merupakan suatu koherensitas dengan ideologi negara, politik negara, maupun politik pembangunan. Oleh sebab itu, sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Fuad Hassan, akan selalu terikat dengan ideologi negara, politik negara, dan juga politik pembangunan.

Fuad Hassan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni pada tanggal 30 Juli 1985. Sebelumnya, Fuad Hassan menggantikan posisi Nugroho Notosusanto yang meninggal pada tanggal 3 Juni 1985. Presiden Soeharto mengingatkan Fuad Hassan pada pelantikannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pada zaman pembangunan, tugas sebagai menteri pendidikan tidaklah ringan. Hal tersebut dikarenakan dari keseluruhan pembangunan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya, pendidikan dan kebudayaan menjadi bagian yang teramat penting. (Asnan, 2018, hlm. 51).

Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, tahun-tahun awal Fuad Hassan menjadi mendikbud, ia tidak banyak melakukan perubahan, tetapi fokusnya lebih kepada penuntasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Benar saja, pada periode Fuad Hassan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun terbit. Menjadi sebuah catatan penting, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, yang terbit pada periode Fuad Hassan menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional.

Hal itu dapat menjadi sebuah indikasi bahwa Fuad Hassan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan mempunyai andil dalam perjalanan sejarah pendidikan nasional. Terlebih lagi, terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, menjadi penanda juga bahwa UU pendidikan yang sebelumnya berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi. Fuad Hassan sendiri menyatakan kepuasannya telah

menyelesaikan seluruh perundang-undangan pendidikan, khususnya UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut beserta peraturan pelaksanaannya. Meski demikian, Fuad Hassan mengakui masih banyak persoalan pendidikan yang belum terpecahkan. Saat itu, Fuad Hassan mengatakan bahwa dengan selesainya seluruh UU dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah sudah memantapkan landasan yang penting, karena UU tersebut merupakan stabilisatornya (dalam bidang pendidikan). Fuad Hassan pun optimis bahwa UU tersebut dapat memecahkan permasalahan pendidikan. Fuad Hassan pun mengemukakan bahwa ia ingin menyaksikan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Wajib belajar tersebut harus berhasil jika ingin bersungguh-sungguh dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (Kompas, 1993, hlm. 16).

Sementara itu mengenai kurikulum yang berlaku pada saat Fuad Hassan yakni Kurikulum 1984, menurut Fuad Hassan daripada mencari jalan terobosan yang acapkali membawa banyak korban, lebih baik merintis jalan secara berangsur-angsur, namun pasti arah dan tujuannya. Langkah tersebut dipermudah sejak diberlakukannya UU Sistem Pendidikan Nasional tersebut yang sudah disepakati menjadi titik tolak bersama untuk membangun pendidikan Indonesia. Fuad Hassan menekankan, selain adanya tujuan jangka panjang yang hendak dicapai dalam pembangunan pendidikan Indonesia, namun seyogyanya tidak pula melupakan langkah jangka pendek yang dibuat. Fuad Hassan mengistilahkan ada tindakan terpendek dari tujuan jangka pendek itu yang harus dilakukan yakni membenahi mutu pendidikan dasar. Hal ini, sesuai pula dengan apa yang ditegaskan oleh Presiden Soeharto ketika menyampaikan pidato RAPBN di DPR. Untuk itu, Fuad Hassan mengatakan diperlukan sebuah perencanaan rinci. Misalnya, sisi mana dari pendidikan dasar itu yang akan dibenahi dahulu, mutu guru, mutu bahan pelajaran, ataukah mutu kurikulumnya.

Menurut Fuad Hassan, yang paling penting adalah menyusun kurikulum yang relevan, tetap tanpa mengurangi arti pendidikan dan peningkatan mutu guru-guru di jenjang pendidikan dasar tersebut. Sebagai tambahan, dalam pembangunan di bidang pendidikan, Fuad Hassan lebih memilih untuk mengefektifkan prosesnya secara keseluruhan. Caranya, dengan segenap kehati-hatian jangan lagi mengulangi kesalahan di masa lalu yang dibuat oleh pihak terdahulu. Bagi Fuad Hassan, memang seringkali jalan yang dianggap terobosan, secara sepintas terlihat lebih menarik, akan tetapi hal tersebut menunjukkan juga tindakan yang kalap. Sebab menurutnya tidak ada sejarah yang menunjukkan bahwa jalan terobosan membawa lebih banyak keuntungan ketimbang kerugiannya (Kompas, 1992, hlm. 12). Artinya, Fuad Hassan tidak ingin perubahan itu dilakukan secara radikal, tidak menginginkan terobosan-terobosan dilakukan secara cepat, melainkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik itu, atau dengan kata lain terobosan perubahan yang dilakukan oleh Fuad Hassan dilakukan secara bertahap.

Perubahan Pendidikan Masa Fuad Hassan

Upaya perbaikan kurikulum melalui pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dalam arti hasil perbaikan kurikulum walaupun dilaksanakan pada tahun 1984/1985, tetapi upaya pemantapan tetap perlu diadakan secara terus menerus. Dengan perbaikan kurikulum yang berlaku dan dimantapkan secara terus menerus dapat diharapkan memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya serta dapat lebih mampu memenuhi keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama lapangan kerja.

Pada 1987, atau dua tahun setelah Fuad Hassan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan membuat gebrakan dengan merancang sebuah kebijakan strategis. Fuad Hassan mengemukakan gagasan di tahun-tahun yang

akan datang pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Tingkat Nasional (EBTANAS) akan dilaksanakan secara desentralisasi, tujuan gagasan tersebut digelontorkan oleh Fuad Hassan adalah untuk menyempurnakan sistem ujian akhir di sekolah-sekolah. Bagi Fuad Hassan, EBTANAS yang sebelumnya dilaksanakan secara sentralisasi menjadi pekerjaan yang sangat besar dan rawan. Di samping itu, pelaksanaan EBTANAS secara sentralisasi telah menciptakan jurang pemisah besar antara pusat dengan daerah. Menurut Fuad Hassan, ide desentralisasi EBTANAS tersebut muncul karena banyak juga keluhan-keluhan yang datang kepadanya mengenai pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir yang memberatkan peserta ujian. Fuad Hassan pun beralasan bahwa ide desentralisasi tersebut dapat mengatasi masalah biaya pelaksanaan ujian akhir yang semakin besar. Menjadi catatan penting lainnya, Fuad Hassan berpendapat bahwa ide desentralisasi juga bertujuan menjamin terjaganya mutu sekolah. Fuad Hassan berkeyakinan bahwa ujian akhir secara sentralisasi membuat jurang antara sekolah yang berada di perkotaan dengan sekolah yang berada di pedesaan kian membesar (Asnan, 2018, hlm. 55-56).

Pada masa Fuad Hassan, dikeluarkan juga kebijakan mengenai desentralisasi ujian masuk perguruan tinggi. Surat keputusan tersebut ditetapkan pada 22 Mei 1989. Adapun kebijakan tersebut berisi mengenai penerimaan calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri diarahkan berdasarkan ujian masuk (*entrance examination*), dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi negeri dan dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing lembaga perguruan tinggi negeri (Arsip Nasional Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 22 Mei 1989).

Pada periode kepemimpinan Fuad Hassan dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi, yang juga di dalamnya berisi mengenai kehadiran SMPT. SMPT sendiri yakni Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, kehadiran SMPT ini

dikhawatirkan dapat semakin membatasi ruang gerak mahasiswa. Terlebih lagi, SMPT yang meskipun dari dan untuk mahasiswa, tapi ternyata tetap dipimpin oleh Pembantu Rektor III (bidang kemahasiswaan). Meski demikian, Fuad Hassan berdalih dengan menegaskan bahwa kebebasan dan kemandirian mahasiswa secara individu maupun bersama-sama dalam menjalankan kegiatannya tidak akan berkurang dengan kehadiran SMPT tersebut, sejauh kegiatan mahasiswa tersebut tidak mengatasnamakan almamater.

Hal yang sama berlaku juga bagi organisasi ekstra universitas yang bergiat di dalam lingkungan kampus. Oleh sebab itu, Fuad Hassan menekankan agar tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Berulang kali Fuad Hassan menegaskan bahwa yang akan dihilangkan adalah upaya pendomplengan berupa pengatasan nama sekelompok kecil mahasiswa terhadap keseluruhan mahasiswa, sementara kelompok kecil tersebut sebenarnya tidak mendapat mandat sama sekali. Bagi Fuad Hassan, pemboncengan semacam itu merupakan tindakan yang tidak etis, oleh sebab itu kehadiran SMPT dimaksudkan untuk mencegah hal semacam itu agar tidak terjadi (Kompas, 1991, hlm. 6).

Untuk itu, guna menghindari berlarutnya kesalahan persepsi tersebut (persepsi bahwa SMPT semakin membatasi ruang gerak mahasiswa), Fuad Hassan lantas membuat sebuah himbauan agar para Pembantu Rektor III untuk menjelaskan hal tersebut kepada para mahasiswa. Bahkan, Fuad Hassan mengusulkan agar dalam setiap pekan orientasi bagi para mahasiswa baru, hal itu (tujuan ada SMPT), untuk selalu diintroduksikan. Selain soal SMPT, yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa adalah tentang sejarah berdirinya perguruan tinggi sejak zaman Plato hingga sekarang, pengertian-pengertian tradisional yang berlaku di perguruan tinggi, termasuk berbagai model forum akademi. Fuad Hassan menekankan bahwa kehadiran SMPT merupakan sebuah hal yang bersifat mutlak di perguruan tinggi, karena lembaga

tersebut merupakan perwakilan mahasiswa yang berdiri seimbang dengan perwakilan pengajarnya dalam bentuk senat guru besar. Fuad Hassan menambahkan “tanpa senat mahasiswa, senat perguruan tinggi tidak akan sempurna” (Kompas, 1991, hlm. 6).

Dalam hal perubahan penamaan gelar kesarjanaan, inti dari dilakukannya perubahan tersebut adalah, pertama untuk mengakhiri pemakaian gelar yang bernuansa Belanda atau bernuansa Barat menjadi bernuansa Indonesia. Kedua, menyesuaikan pemakaian atau pemakaian gelar kesarjanaan dengan kaidah bahasa Indonesia serta diperjelas dengan menyebutkan bidang ilmu pemegang gelar kesarjanaan. Dengan demikian, melalui kebijakan Fuad Hassan ini, pemakaian gelar doktorandus (Drs.) dan gelar doktoranda (Dra.), serta gelar insinyur telah berakhir. Gelar-gelar tersebut telah digunakan sejak masa kolonialisme Belanda dan dipakai dalam berbagai bidang keilmuan dari penyandang gelar tersebut. Gelar Drs atau Dra bisa saja dipakai oleh sarjana sejarah, filsafat, ilmu politik, sosiologi, tarbiyah, ushuludin dan sebagainya. Gelar Ir atau insinyur juga dipakai oleh sarjana berbagai bidang ilmu, seperti teknik pertanian, peternakan dan sebagainya. Pemakaian gelar ini diganti dengan menyebutkan sarjana depan bidang ilmu yang disandang, namun berdasarkan kelompok atau bidang rumpun ilmu, seperti sarjana humaniora, sarjana teknik, sarjana pendidikan, sarjana pendidikan Islam dan seterusnya (Asnan, 2018, hlm. 58-59).

Meskipun baru diterbitkan setelah masa jabatannya sebagai menteri pendidikan berakhir, Fuad Hassan juga turut merumuskan kurikulum 1994. Fuad Hassan mengatakan bahwa kurikulum baru yang diberlakukan pada 1994 tersebut sebenarnya telah selesai digodok akhir Desember 1992. Pengumumannya sengaja diundur sampai selesainya SU MPR. Pengunduran penjelasan tentang kurikulum 1994 tersebut karena munculnya reaksi dari berbagai kalangan tentang penerbitan penyelenggara Program MBA dan masalah

gelar, karena masalah tersebut berkelanjutan dan banyak orang, termasuk media massa, salah menangkap penjelasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga hal tersebut menyebabkan kurikulum 1994 sempat ditangguhkan (Kompas, 1993, hlm. 16).

Menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005), kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah sebuah reaksi terhadap kebutuhan dari masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan yang tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kebijakan publik pada umumnya adalah tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah (Suharto, 2005, hlm. 44-45).

Berkaca pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan/tindakan yang telah dirumuskan oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah) untuk merespon masalah-masalah aktual/sosial. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik yang dimaksud yakni kebijakan dalam bidang pendidikan. Artinya, kebijakan pendidikan yang dikeluarkan merupakan respon pemerintah terhadap masalah-masalah yang tengah berkembang, maupun solusi-solusi yang dihadirkan oleh pemerintah dalam bidang

pendidikan itu sendiri. Sudah barang tentu, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan publik dalam bidang pendidikan, adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada 1985, Fuad Hassan dipastikan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Tempo, 1985). Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pada awal-awal menjadi menteri, tidak banyak terobosan yang dilakukan oleh Fuad Hassan. Kebijakan Fuad Hassan untuk tidak banyak melakukan terobosan di awal-awal kepemimpinannya tersebut dapat memberikan dampak yang positif. Hal itu dikarenakan, Fuad Hassan lebih memperhatikan stabilitas dalam dunia pendidikan, sambil secara berangsur-angsur atau secara evolutif menyiapkan rancangan-rancangan yang lebih baik.

Keputusan Fuad Hassan yang tidak banyak melakukan terobosan di awal kepemimpinannya ini, menyebabkan ia turut mempertahankan kurikulum 1984 yang dibuat pada periode Nugroho Notosusanto menjabat sebagai mendikbud. Salah satu pengamat pendidikan, yakni J.I.G.M. Drost, turut memberikan komentarnya mengenai kurikulum 1984 tersebut. Bagi Drost, kurikulum 1984 merupakan kurikulum yang baik dan Drost menyepakati agar kurikulum 1984 dipertahankan. Meski demikian, Drost memberikan catatan-catatan, bahwa dalam kurikulum 1984 tersebut mengandung berbagai macam kelemahan, kelemahan-kelemahannya adalah terlalu berat karena terlalu luas dan terlalu sarat dengan hal-hal yang tidak relevan. Maka, menurutnya baik di SLTP maupun SLTA, jumlah pelajaran selama satu minggu tidak boleh lebih dari 36 jam pelajaran, dengan ditambahkan keterampilan seperti komputer. Jumlah mata pelajaran di kelas 2 dan 3 SMA harus dikurangi, sehinggakedalam pengetahuan dan kedalaman pengertian yang dituntut oleh perguruan tinggi dapat tercapai. Kelemahan SMA saat itu ialah banyak pengetahuan, tetapi sedikit pengertian. Padahal menurut Drost, yang dituntut oleh perguruan tinggi bukan pengetahuan yang luas, melainkan kedalaman

pengertian. Akan tetapi manusia hanya dapat memperoleh kedalaman pada pengetahuan yang terbatas. Ini disebut juga spesialisasi atau juga profesionalisme berdasarkan keahlian. Oleh karena pengajaran SMA diarahkan kepada studi di Perguruan Tinggi, maka Drost meyakini bahwa dengan mencapai kedalaman pengertian lewat kurikulum 1984 memang perlu untuk diperbaiki, pelajar dapat meraih kematangan yang dituntut oleh setiap disiplin sebagai dasar waktu mulai menempuhnya (Drost, 1998).

Pada masa awal kepemimpinan Fuad Hassan ini, meski Fuad Hassan meneruskan kurikulum 1984, akan tetapi Fuad Hassan pun turut menyumbang pembaruan dalam kurikulum 1984 tersebut, yakni penambahan muatan lokal. Tentu saja penambahan muatan lokal ini, berdampak positif bagi peserta didik, karena lebih memungkinkan peserta didik untuk lebih mengenai lingkungannya, kebudayaan lokalnya maupun yang menjadi ciri khas ataupun keunikan daerahnya. Bila ditinjau lebih jauh, tentu saja hal itu berkesinambungan dengan pendapat Fuad Hassan yang selalu menekankan pentingnya kebudayaan ataupun untuk melihat nilai-nilai lokalitas (termasuk sosial budaya) untuk memecahkan masalah di daerah-daerah. Dengan kata lain, pemecahan masalah tersebut tidak hanya berangkat dari hal yang sifatnya umum, tetapi harus memerhatikan juga kondisi-kondisi sosial budaya daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, muatan lokal adalah kebijakan yang dirumuskan agar peserta didik lebih mengenal nilai-nilai lokalitas ataupun keunikan daerahnya masing-masing.

Meski di sisi lain, konsekuensi logis dari meneruskan kurikulum 1984, yakni diteruskannya pelajaran sejarah dan PPKN ataupun PSPB (Pengajaran Sejarah Perjuangan Bangsa) yang sudah dirintis sejak Nugroho Notosusanto yang dianggap penuh dengan indoktrinasi dan sarat akan kepentingan penguasa untuk mempertahankan status quo. Tentu saja, hal tersebut memang menjadi salah satu permasalahan utama pendidikan di

Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Oleh sebab itu, dapat dipahami kebijakan Fuad Hassan yang demikian, memang berkaitan dengan ideologi negara.

Hal itu pun mendapat banyak perhatian dari para pakar pendidikan, salah satunya yakni Darmaningtyas. Darmaningtyas berpendapat bahwa pelajaran sejarah dan PPKN, diajarkan bukan berdasarkan kebutuhan afeksi dan kognisi siswa, melainkan kebutuhan penguasa untuk mempertahankan status quo-nya. Darmaningtyas mencontohkan dominannya pengajaran sejarah mengenai peristiwa G30S/ PKI, bahwa pencekokan itu merupakan rekayasa penguasa untuk mempertahankan status quo. Hal itu dibuktikan, ketika Soeharto mundur sebagai presiden, pelajaran sejarah tersebut banyak digugat. Sebagai catatan tambahan, pada masa reformasi sendiri, tuntutan untuk merevisi pelajaran sejarah tersebut mulai bermunculan, kemudian barulah pada masa Juwono Sudarsono menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tuntutan-tuntutan revisi atas pelajaran sejarah itu mendapatkan respon (Darmaningtyas, 1999, hlm. 4). Dengan kata lain, untuk soal pengajaran sejarah dan PPKN tersebut, dapat dikatakan Fuad Hassan menjadi bagian untuk semakin memapankan kekuasaan Orde Baru yang juga dianggap militeristik.

Dampak lain dari kebijakan Fuad Hassan, yakni perhatian lebihnya untuk studi-studi humaniora. Di samping membuat galeri nasional, yang tentu saja kita bisa berpendapat hal itu karena dipengaruhi latar belakang minat Fuad Hassan sejak kecil terhadap seni, Fuad Hassan pun menekankan arti pentingnya sastra ataupun kebudayaan dalam kehidupan. Hal tersebut dapat dilihat dari kurikulum 1994 yang ikut digagasnya.

Kebijakan Fuad Hassan lainnya yang penting untuk diperhatikan, yakni mengenai pedoman organisasi kemahasiswaan. Kebijakan tersebut ditetapkan pada 28 Juli 1990, salah satu isi dari kebijakan tersebut, yakni mengenai pembentukan senat mahasiswa perguruan tinggi atau disingkat menjadi SMPT (Arsip Nasional Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

28 Juli 1990). Dengan adanya kebijakan tersebut, di satu sisi berdampak positif, dimana pergerakan sekelompok kecil mahasiswa tidak akan gampang untuk mengklaim sebagian representasi dari sikap kampus ataupun sikap mahasiswa secara keseluruhan, tetapi di sisi lain, adanya kebijakan tersebut dianggap dapat membungkam pergerakan mahasiswa karena lebih memungkinkan pihak kampus (dekanat/rektorat) untuk melakukan intervensi-intervensi.

Penting untuk diperhatikan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa kebijakan publik akan sangat erat dengan ideologi negara (tafsiran penguasa) ataupun politik pembangunan. Leo Agustino (2016, hlm. 1-2) berpendapat bahwa kebijakan publik pun bisa dianggap sebagai keputusan yang bersifat politik semata, dalam arti hanya mementingkan golongan, kelompok ataupun partai tertentu saja. Oleh sebab itu, dalam beberapa hal yang sudah disinggung di atas, dapat dikatakan kebijakan Fuad Hassan, meski di satu sisi perlu diapresiasi mengingat sumbangsuhnya yang baik bagi pendidikan Indonesia, akan tetapi di sisi lain, kebijakannya pun terkadang merupakan sebuah pengejawantahan dari status quo, dalam hal ini pemerintahan Soeharto.

Sumbangsih lainnya yang dilakukan Fuad Hassan, yakni soal perubahan nama gelar, di mana gelar pendidikan tinggi lebih spesifik mengarah kepada keilmuan terkait (Arsip Nasional Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). tentu saja itu perlu diapresiasi kalau kita melihat dalam konteks tuntutan fragmentasi ilmu yang begitu tajam, di mana pergantian nama gelar tersebut koheren dengan bidang-bidang keilmuan yang semakin dispesifikasikan. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut pun menunjukkan semangat kebangsaan yang berusaha digalakkan oleh Fuad Hassan, sehingga pemberian gelar akademik di nasionalisasikan, dalam arti menggunakan bahasa Indonesia yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda. Tidak mengherankan, kebijakan soal perubahan

gelar akademik ini, sampai sekarang masih relevan digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa latar belakang kehidupan Fuad Hassan yang meliputi ketertarikan Fuad Hassan terhadap bidang seni, sikap moderat orang tuanya yang menasehati agar tidak mengabaikan pendidikan formal, serta jejak pemikirannya dalam bidang filsafat, psikologi, pendidikan, politik, hubungan internasional dan seni budaya selama berkiprah sebagai teknokrat yang terlibat dalam birokrasi negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Tahun 1985-1993.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Fuad Hassan selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan berbagai dampak pada pendidikan di Indonesia. Keputusannya untuk tidak banyak melakukan terobosan di awal-awal kepemimpinannya memberikan dampak positif karena stabilitas dalam dunia pendidikan lebih diperhatikan, sambil secara berangsur-angsur menyiapkan rancangan-rancangan yang lebih baik. dipertahankannya Kurikulum 1984 dengan beberapa pembaruan di antaranya penambahan muatan lokal juga berdampak positif bagi peserta didik, karena lebih memungkinkan peserta didik untuk lebih mengenal lingkungannya, kebudayaan lokalnya maupun yang menjadi ciri khas ataupun keunikan daerahnya. Kebijakannya yang lain juga masih relevan digunakan dalam dunia pendidikan sampai masa kini, seperti desentralisasi EBTANAS, desentralisasi ujian masuk perguruan tinggi, dan perubahan penamaan gelar akademik yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda digantikan dengan bahasa Indonesia serta lebih spesifik mengarah kepada keilmuan terkait, hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan semangat kebangsaan. Dampak lain dari kebijakan

Fuad Hassan, yakni lebih diperhatikannya studi-studi humaniora dan dibuatnya Galeri Nasional.

Kebijakan yang dikeluarkan Fuad Hassan di bidang pendidikan juga mendapat banyak perhatian dari pakar pendidikan. Salah satunya mengenai konsekuensi dari diteruskannya Kurikulum 1984 yang juga berarti diteruskannya pelajaran PSPB yang dianggap penuh dengan indoktrinasi dan sarat kepentingan penguasa untuk mempertahankan status quo. Selain itu, Kurikulum 1984 memiliki kelemahan yakni terlalu berat karena terlalu luas dan sarat akan hal-hal yang tidak relevan. Pada tingkat SMA terlalu banyak pengetahuan tetapi sedikit pengertian, sementara yang dituntut oleh perguruan tinggi adalah pencapaian kedalaman pengetahuan dan kedalaman pengertian. Oleh karena itu, Kurikulum 1984 perlu diperbaiki dengan mengurangi mata pelajaran dan menambahkan keterampilan.

REFERENSI

- Agustina, E. (2019). Soekarno, nasakom, dan buku di bawah bendera revolusi sebagai materi ajar pelajaran sejarah sma. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 1-10.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Asnan, G. (2018). *Biografi tujuh menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia*. [Online]. Diakses dari: <https://repo.unand.ac.id/> (13-09-2019)
- Buchori, M. (2001). *Pendidikan antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmaningtyas. (1999, 3 Mei). "Pendidikan miiter(istik)". *Kompas*, hlm. 4.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan yang memiskinkan*. Galang Press.
- Drost, J.I.G.M. (1998). *Sekolah: mengajar atau mendidik?*. Kanisius.
- FIT. (1991, 8 Januari). Fuad hassan: smpt tak kurangi kebebasan mahasiswa. *Kompas*, hlm. 6.
- Fauzi, W. I., Hasanah., N.N. (2019). Haji Agus Salim: Diplomat Dari Negeri Kata-Kata. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 111-124.
- Gottschalk, Louis. (2008). *Mengerti sejarah*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Hassan, F. (1977). *Heteronomia*. Pustaka Jaya.
- HRD. (1993, 19 Maret). "Fuad Hassan: Memuaskan, Seluruh Perundangan Pendidikan Selesai". *Kompas*, hlm. 16.
- Ismaun. (2005). *Sejarah sebagai ilmu*. Historia Utama Press.
- Kemdikbud. (2015). *Sejarah kementerian dan kebudayaan*. [Online]. Diakses dari: <https://Kemdikbud.go.id/SejarahKemdikbud/> (15-12-2019)
- Maryati (2007). *Fuad hassan di mata penerusnya*. [Online]. Diakses dari: <https://Antaraneews.com/berita/86217/>
- OSD. (1992, 10 Maret). "Mendikbud Fuad Hassan: Indonesia Memiliki Cukup Sekolah untuk Isi Kebutuhan Lapangan Kerja". *Kompas*, hlm. 12.
- Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0301/3/1989 tentang Desentralisasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).
- Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0457/0/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 036/u/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.
- Saptono, dkk. (2007, 8 Desember). Obituari: ode bagi sartono kartodirdjo-fuad hassan. *Kompas*, hlm. 1.
- Tempo. (1985, 13 Agustus). Wawancara dengan Fuad Hassan. *Tempo*.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi sejarah*. Penerbit Ombak.
- Suharto, E. (2005). *Analisis kebijakan publik*. Alfabeta.